



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUD dr. RASIDIN
DENGAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 130.11/PKS/BKS-PDG/2022

Nomor : 01/UN16.12.D/HK.07.00/2022

Pada hari ini Jumât tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (11-02-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HERLIN SRIDIANI** : Direktur RSUD dr. RASIDIN Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Air Paku Sungai Sapih Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 821.21/ 245/ SK - BKPSDM/ 2021 tanggal 13 April 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. RASIDIN Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **DEFRIMAN DJAFRI** : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus Universitas Andalas Limau Manis Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 575/UN16.R/KPT/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Universitas Andalas telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
Nomor : 130.1/KB/BKS-PDG/2022
Nomor : KH-16/UN.16.R/HK.07.00/2022
 2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka (1) maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis dalam rangka menghasilkan tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga gizi yang berkualitas dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bidang kesehatan bagi dosen dan mahasiswa.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang :

- a. Pendidikan ;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian masyarakat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

- (1) Melakukan praktek klinik gizi;
- (2) Melakukan praktek Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi Gizi;
- (3) Melakukan praktek kerja lapangan bidang Administrasi Kebijakan Kesehatan, Epidemiologi dan Biostatistik, Keselamatan dan Kesehatan Kerja-Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan dan Kesehatan Reproduksi;
- (4) Melakukan magang mandiri bidang Administrasi Kebijakan Kesehatan, Epidemiologi dan Biostatistik, Keselamatan dan Kesehatan Kerja-Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan dan Kesehatan Reproduksi;
- (5) Melakukan penelitian; dan
- (6) Melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf II	Paraf I
	

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. menerima surat permohonan tentang kegiatan sesuai dengan ruang lingkup di pasal 3 yang dilampiri dengan jadwal, nama dosen dan/atau mahasiswa dari PIHAK KEDUA minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan;
- b. mendapatkan penjelasan dari PIHAK KEDUA tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan/atau mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- c. melakukan verifikasi terhadap dosen dan/atau mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- d. menetapkan lokasi, jadwal dan jumlah dosen dan/atau mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- e. mengundang rapat terkait pelaksanaan kegiatan yang sedang dan telah terlaksana;
- f. mendapatkan penggantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- g. melaporkan kepada PIHAK KEDUA tentang dosen dan/atau mahasiswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan;
- h. memperoleh kontribusi berupa penerimaan atas tarif layanan dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mengembalikan dosen dan/atau mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan ke PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan pada instansi PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. menyediakan sarana dan prasarana yang ada untuk dosen dan/atau mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. menyediakan pendamping/pembimbing untuk dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. memberikan pendampingan/bimbingan kepada dosen dan/atau mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- d. memberikan hasil penilaian akhir kegiatan sesuai format dan jadwal.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. mengajukan permohonan lokasi, jadwal dan jumlah peserta kegiatan;
- b. memanfaatkan fasilitas PIHAK KESATU sesuai kompetensi yang harus dicapai selama pelaksanaan kegiatan; dan
- c. memperoleh pendampingan/bimbingan dan hasil evaluasi dari PIHAK KESATU terhadap dosen dan/atau mahasiswa PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. memberikan penjelasan kepada PIHAK KESATU tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan/atau mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. menghadiri rapat terkait kegiatan yang sedang dan telah terlaksana yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;

- c. mengganti sarana atau fasilitas PIHAK KESATU yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- d. membayar tarif layanan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
 - a. Daftar dosen dan/atau mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
 - b. Buku panduan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Surat Keterangan Kesehatan dosen dan/atau mahasiswa.
- (2) PIHAK KESATU melakukan verifikasi terhadap surat permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU menjawab permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) PARA PIHAK melakukan serah terima dan orientasi dosen dan/atau mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu.
- (6) PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri.
- (7) PIHAK KEDUA membayar tarif layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) PIHAK KESATU menyerahkan hasil penilaian akhir pelaksanaan kegiatan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf II	Paraf I
	

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama .
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

RSUD dr. Rasidin Padang

Up. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Jalan Aie Paku Sei. Sapih

Telepon 081363106625 (Ns.Afriyani,S.Kep, M.Kep) / Fax (0751) 495330

Email: rsuddr.rasidin2017@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Kampus Universitas Andalas Limau Manis Kelurahan Limau Manis

Kecamatan Pauh Kota Padang

Telepon / WA : 081363327502 (Daswendi, S.Sos - Up. Koordinator

Pengelola Bidang Tata Usaha FKM Unand)

Email : sekretariat@fkm.unand.ac.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:

- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PASAL 13 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS



DEFRI MAN DJAFRI
Dekan

PIHAK KESATU,
RSUD dr. RASIDIN PADANG 9



PIERLIN SRIDIANI
Direktur

Paraf II	Paraf I